

REPRESENTASI KEBAHASAAN PADA TEKS BERITA PENERBANGAN DRONE DI BROMO DALAM PERSPEKTIF SEPULUH MEDIA DARING INDONESIA (SEBUAH ANALISIS WACANA KRITIS)

Wangi Puspa Muslim¹, Hasan Busri², Elva Riezky Maharany³

(Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia)

Email: wangipuspa49@gmail.com

Abstrak: Fenomena larangan penggunaan *drone* di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pasca ditemukannya ladang ganja menunjukkan bagaimana media daring Indonesia membentuk realitas melalui bahasa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan representasi kebahasaan sepuluh media daring Indonesia dalam pemberitaan terkait penerbangan *drone* di Bromo, menganalisis strategi bahasa yang meliputi kosakata, diksi, kohesi, koherensi, dan struktur kalimat dalam pembingkai peristiwa, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar media. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough, difokuskan pada dimensi teks. Data berupa sepuluh berita dari CNN Indonesia, Merdeka.com, Suara.com, Klikmedianetwork.com, Kompas.com, JawaPos.com, Liputan6.com, RadarSolo.com, Ntvnews.id, dan DetikJatim. Hasil penelitian menunjukkan tiga strategi utama yang digunakan media yakni: diksi formal untuk menampilkan kesan objektif, eufemisme untuk melembutkan narasi represif, dan nominalisasi untuk mengaburkan agen pelaku. Kesamaan antar media tampak pada penekanan legitimasi larangan *drone* melalui bingkai hukum, keamanan wisatawan, dan pelestarian lingkungan. Perbedaan terlihat pada gaya penyajian, di mana media arus utama cenderung netral dan informatif, sementara media berbasis klik menonjolkan sensasionalisme. Kesimpulannya, bahasa dalam teks berita berfungsi sebagai perangkat konstruksi realitas sosial yang sarat ideologi, sehingga penelitian ini menegaskan pentingnya literasi kritis bagi masyarakat dalam menafsirkan pemberitaan.

Kata kunci: representasi kebahasaan, analisis wacana kritis, Norman Fairclough, media daring, larangan *Drone*.

PENDAHULUAN

Bahasa memegang peranan sentral dan tak terpisahkan dalam membentuk cara publik memahami dan menginterpretasikan suatu peristiwa. Dalam ranah pemberitaan media, fungsi bahasa melampaui sekadar penyampaian informasi faktual; ia bertindak sebagai instrumen kuat dalam konstruksi realitas sosial, yang secara inheren sarat dengan sudut pandang, ideologi, dan kepentingan tertentu (Fairclough, 1995; Eriyanto, 2012). Norman Fairclough, melalui kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) yang komprehensif, menegaskan bahwa bahasa harus dipahami sebagai praktik sosial yang selalu terikat erat dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya (Jørgensen & Phillips, 2002). Oleh karena itu, melakukan analisis mendalam terhadap bahasa yang digunakan oleh media menjadi esensial

untuk membongkar bagaimana realitas dikonstruksi dan bagaimana konstruksi tersebut pada gilirannya memengaruhi opini serta persepsi publik.

Di Indonesia, lanskap media telah mengalami pergeseran signifikan, dengan media daring kini mendominasi dalam produksi dan penyebaran informasi. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat memperoleh berita melalui platform digital, menandai pergeseran budaya informasi di mana media daring bukan hanya saluran distribusi fakta, melainkan aktor utama dalam membentuk realitas sosial. Dengan kecepatan dan jangkauannya yang luas, media daring memiliki kekuatan signifikan untuk memengaruhi kerangka berpikir publik tentang berbagai peristiwa. Penting untuk diingat bahwa media massa tidak pernah sepenuhnya netral dalam pemberitaannya. Setiap teks berita merupakan hasil dari proses seleksi, penonjolan, dan perumusan fakta yang berkelindan dengan kepentingan redaksi serta konteks sosio-politik yang lebih luas (Richardson, 2007). Analisis terhadap bahasa media, oleh karena itu, menjadi langkah krusial untuk memahami bagaimana realitas dikonstruksi dan disajikan kepada khalayak.

Peristiwa larangan penerbangan *drone* di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pasca penemuan ladang ganja merupakan kasus aktual yang sangat relevan untuk merefleksikan kerja representasi kebahasaan media daring. Kawasan konservasi ini, yang menarik ratusan ribu wisatawan setiap tahun, memiliki regulasi ketat terkait penggunaan *drone* (Permenhub No. 37 Tahun 2020 dan kebijakan internal pengelola). Tujuan utama regulasi ini adalah melindungi satwa liar, menjaga kenyamanan wisatawan, serta mencegah potensi kecelakaan. Namun, pelanggaran terhadap aturan ini masih sering terjadi dan mendapat sorotan luas dari media. Sepuluh media daring nasional yang menjadi objek penelitian ini melaporkan kasus tersebut dengan ragam sudut pandang: ada yang menekankan aspek hukum "melanggar aturan", "ditindak aparat", ada pula yang menonjolkan dimensi lingkungan "menggangu satwa liar", "merusak ekosistem", sementara sebagian lain menyoroti aspek pariwisata "mencoreng citra destinasi wisata Bromo". Perbedaan strategi kebahasaan ini secara jelas memperlihatkan bagaimana media membingkai isu yang sama dengan perspektif yang berbeda, menegaskan bahwa teks berita bukanlah cermin realitas yang netral, melainkan konstruksi yang merepresentasikan realitas sesuai kepentingan, ideologi, dan konteks redaksional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti bagaimana media membentuk representasi kebahasaan dalam teks berita. Busri (2009) menunjukkan bahwa kosakata, metafora, dan struktur kalimat memperkuat ideologi tertentu, mengarahkan pembaca pada interpretasi yang diinginkan. Sementara Agustin (2017) menemukan bahwa gaya retorika media dapat membentuk citra positif maupun negatif terhadap aktor sesuai orientasi redaksional, menunjukkan adanya bias yang disengaja. Penelitian Tenriawali (2018) secara spesifik menekankan peran strategi nominasi dan identifikasi dalam memosisikan aktor, misalnya melalui penggunaan kalimat aktif dan pasif yang secara halus menggeser fokus tanggung jawab atau agensi. Mardiah (2022) lebih lanjut mengkaji eufemisme yang digunakan untuk memperhalus tindakan represif aparat, sebuah strategi linguistik yang bertujuan meredam potensi kritik publik. Selain itu, Matilda dkk. (2023) menyoroti penggunaan bahasa baku dan konjungsi dalam menjaga kohesi wacana, memastikan alur informasi yang lancar dan meyakinkan. Kemal dkk. (2023) menemukan bias ideologis dalam representasi perempuan di media politik, menunjukkan bagaimana bahasa dapat melanggengkan stereotip dan Aspinanda dkk. (2025) menunjukkan kelemahan konjungsi temporal yang dapat mengurangi kejelasan narasi berita, menggarisbawahi pentingnya ketepatan linguistik.

Namun, mayoritas penelitian tersebut masih berfokus pada isu politik, sosial, atau tragedi, sehingga kajian tentang representasi kebahasaan dalam isu pariwisata dan lingkungan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus merumuskan tiga pertanyaan yang menjadi inti investigasi: (1) bagaimana bentuk representasi kebahasaan yang digunakan sepuluh media daring Indonesia dalam memberitakan kasus penerbangan *drone* di Bromo, mencakup analisis mendalam terhadap pilihan kata, struktur kalimat, dan perangkat kohesi; (2) strategi bahasa apa yang mencakup kosakata, diksi, kohesi, koherensi, dan struktur kalimat dalam membentuk citra peristiwa, serta bagaimana strategi ini berkontribusi pada pembingkai narasi; dan (3) apa persamaan dan perbedaan representasi kebahasaan antar media, yang akan mengungkap pola dominan dan variasi ideologis. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk representasi kebahasaan secara rinci, menganalisis strategi linguistik yang digunakan untuk mengkonstruksi makna, serta mengidentifikasi variasi representasi yang muncul dalam pemberitaan, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang peran bahasa dalam membentuk persepsi publik.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi signifikan pada pengembangan analisis wacana kritis, khususnya penerapan model Norman Fairclough pada teks media daring

dengan fokus isu lingkungan dan pariwisata yang masih jarang dikaji di Indonesia. Ini memperluas cakupan AWK ke domain yang relevan dengan tantangan kontemporer. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya literasi media kritis, agar masyarakat mampu membaca pemberitaan secara cermat dan tidak mudah terjebak dalam framing ideologis media. Dengan mengisi celah penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada isu politik atau sosial, kajian ini menawarkan kontribusi baru pada ranah representasi kebahasaan di media daring Indonesia. Selain itu, penelitian ini relevan dengan dinamika komunikasi kontemporer yang ditandai oleh meningkatnya disinformasi, clickbait, dan komodifikasi isu publik dalam pemberitaan daring. Dengan menganalisis kasus aktual penerbangan *drone* di Bromo, penelitian ini tidak hanya mengungkap praktik representasi kebahasaan, tetapi juga menghadirkan refleksi kritis tentang bagaimana isu lingkungan dan pariwisata diposisikan dalam wacana media. Hal ini memperkaya pemahaman akademik mengenai hubungan antara bahasa, media, dan kekuasaan, sekaligus menawarkan kontribusi praktis bagi penguatan ekosistem informasi yang lebih sehat di ruang publik Indonesia.

Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan pendekatan penelitian yang fundamental dalam memahami bahasa sebagai praktik sosial yang sarat dengan muatan ideologis dan terkait erat dengan relasi kekuasaan dalam masyarakat (Fairclough, 1995). AWK tidak hanya menelaah aspek linguistik secara tekstual, melainkan juga secara holistik mempertimbangkan dimensi sosial, historis, dan kultural yang membentuk suatu wacana. Fairclough (1995) merumuskan kerangka analisis tiga dimensi yang menjadi tulang punggung penelitian ini: pada penelitian ini di hanya di fokuskan pada dimensi teks yang berfokus pada fitur-fitur linguistik dalam teks itu sendiri. Analisis mencakup pilihan kosakata (diksi), struktur sintaksis (tata bahasa, seperti penggunaan kalimat aktif atau pasif, nominalisasi), penggunaan metafora, serta perangkat kohesi (keterkaitan antarunsur bahasa) dan koherensi (keterpaduan makna logis). Pada level ini, bahasa dipandang sebagai representasi dari ideologi dan relasi kuasa, di mana setiap pilihan linguistik dapat merefleksikan atau bahkan membentuk pandangan dunia tertentu.

Representasi Kebahasaan Representasi kebahasaan adalah konsep kunci yang menjelaskan bagaimana bahasa digunakan untuk memproduksi makna dan menggambarkan realitas dalam bentuk teks (Halliday, 1994). Dalam pandangan ini, bahasa tidak bersifat netral; sebaliknya, ia membawa muatan ideologis yang secara aktif membentuk cara pandang terhadap realitas (Fairclough, 1995). Eriyanto (2012) menguraikan representasi kebahasaan melalui tiga aspek utama: (1) pilihan kata dan diksi yang mencerminkan sikap dan penilaian

media terhadap suatu peristiwa, misalnya penggunaan kata "oknum" versus "pelaku" dapat mengubah persepsi tanggung jawab; (2) struktur sintaksis yang menunjukkan penekanan dan sudut pandang tertentu, seperti penggunaan kalimat pasif untuk mengaburkan agen; dan (3) perangkat kohesi dan koherensi yang mengatur hubungan antarkalimat dan antarpagraf untuk membentuk alur narasi yang diinginkan, memastikan pesan disampaikan secara persuasif. Representasi ini bersifat dinamis, maknanya dapat berubah sesuai konteks dan budaya, dan berfungsi sebagai alat efektif untuk membentuk opini publik, baik secara langsung maupun implisit, seringkali tanpa disadari oleh pembaca.

Strategi Bahasa dalam Media Strategi bahasa merujuk pada seperangkat teknik yang digunakan media dalam menyampaikan informasi untuk membentuk citra, memengaruhi interpretasi, dan mengarahkan persepsi pembaca atau pendengar (Eriyanto, 2012). Bahasa dalam media adalah instrumen kekuasaan yang mampu membingkai realitas sesuai kepentingan tertentu. Strategi ini mencakup; (1) pilihan kosakata dan diksi, pemilihan kata yang berkonotasi positif, negatif, atau netral secara signifikan memengaruhi persepsi pembaca. Misalnya, penggunaan "penertiban" alih-alih "penangkapan" dapat mengubah persepsi tentang tindakan aparat. Diksi ini sering kali dipengaruhi oleh sikap, ideologi, atau tujuan media, dan dapat menjadi indikator bias redaksional. (2) Kohesi dan koherensi, kohesi (keterkaitan gramatikal dan leksikal antarunsur bahasa) dan koherensi (keterpaduan makna logis antarbagian teks) memastikan pesan dapat diterima pembaca dengan mudah dan mengarahkan interpretasi mereka terhadap peristiwa yang diberitakan (Halliday & Hasan, 1976). Kohesi yang kuat dapat membuat argumen terasa lebih meyakinkan, sementara koherensi yang baik memastikan alur narasi yang logis dan mudah diikuti. (3) Struktur kalimat, penggunaan kalimat aktif atau pasif, penempatan subjek, serta penghilangan (ellipsis) bagian kalimat dapat mengubah fokus perhatian pembaca dan menggeser tanggung jawab (Van Dijk, 2008). Misalnya, "*Drone* dilarang" (pasif) berbeda dampaknya dengan "Pemerintah melarang *drone*" (aktif), yang pertama lebih menekankan larangan itu sendiri, yang kedua menekankan agen yang melarang. (4) Gaya bahasa dan framing linguistik, pemanfaatan perangkat retorik seperti metafora misalnya, "Bromo adalah permata pariwisata", hiperbola misalnya, "ancaman besar bagi ekosistem", eufemisme misalnya, "penyesuaian tarif" alih-alih "kenaikan harga", dan ironi untuk menarik perhatian dan memperkuat citra. Framing linguistik adalah proses pemilihan kata, struktur kalimat, dan pola narasi tertentu untuk menonjolkan aspek tertentu dari peristiwa, sambil secara strategis

mengaburkan atau mengecilkan aspek lainnya (Entman, 1993), sehingga membentuk kerangka interpretasi bagi pembaca.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah mendeskripsikan fenomena kebahasaan dalam teks berita secara mendalam, tanpa keterlibatan data lapangan. Kerangka analisis yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, khususnya pada dimensi teks yang mencakup kajian kosakata, tata bahasa, kohesi, dan koherensi.

Objek penelitian berupa sepuluh teks berita daring terkait pelarangan penggunaan *drone* di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Berita dipilih secara purposive berdasarkan kriteria kredibilitas media, relevansi dengan isu penelitian, dan keragaman gaya bahasa. Media daring yang dianalisis meliputi CNN Indonesia, Merdeka.com, Suara.com, Klikmedianetwork.com, Kompas.com, JawaPos.com, Liputan6.com, RadarSolo.com, Ntvnews.id, dan DetikJatim. Setiap teks berita diunduh langsung dari situs resmi media, kemudian dibaca dan dicatat bagian-bagian kebahasaan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengakses dan menyimpan teks berita dari media daring. Data dianalisis melalui tiga tahap: (1) identifikasi unsur kebahasaan berupa diksi, kosakata, struktur kalimat, kohesi, dan koherensi; (2) klasifikasi strategi representasi kebahasaan yang digunakan masing-masing media; dan (3) perbandingan antar media untuk menemukan pola dominan, variasi, serta kecenderungan ideologis. Analisis ini memungkinkan peneliti mengungkap bagaimana bahasa dipakai media untuk membingkai isu larangan *drone* dan membentuk realitas sosial di ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil dan pembahasan penelitian mengenai representasi kebahasaan media daring Indonesia dalam pemberitaan larangan penggunaan *drone* di Bromo. Terdapat tiga fokus utama dalam analisis ini: (1) bentuk representasi kebahasaan yang digunakan media, yang mencakup pemilihan diksi formal, penggunaan eufemisme, dan nominalisasi; (2) strategi dan variasi gaya pemberitaan antar media, yang memperlihatkan perbedaan antara media arus utama, media semi-klik, dan media sensasional; serta (3)

implikasi dari perbedaan dan persamaan representasi tersebut, baik dari sisi ideologis maupun dampaknya terhadap opini publik. Ketiga fokus ini dibahas secara terpadu untuk menjawab rumusan masalah sekaligus menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan analisis wacana kritis di Indonesia.

Bentuk Representasi Kebahasaan dalam Pemberitaan

Bentuk Representasi Kebahasaan dalam Pemberitaan Analisis terhadap sepuluh teks berita secara komprehensif memperlihatkan bahwa media daring Indonesia menggunakan strategi kebahasaan yang beragam dan terencana dalam membingkai isu larangan *drone* di Bromo. Tiga pola dominan yang muncul secara konsisten adalah penggunaan diksi formal untuk menampilkan kesan objektivitas dan otoritas, eufemisme untuk melembutkan narasi yang berpotensi represif, serta nominalisasi untuk mengaburkan agen pelaku sekaligus secara implisit menekankan legitimasi kebijakan. Misalnya, CNN Indonesia, sebagai salah satu media arus utama, secara cermat memilih frasa, “Larangan penggunaan *drone* di kawasan TNBTS diberlakukan demi keamanan dan kenyamanan wisatawan.” Pilihan diksi ini tidak hanya informatif, tetapi juga secara strategis menggunakan bahasa formal untuk memperkuat citra kebijakan sebagai langkah yang legal, rasional, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Media arus utama lainnya, seperti Kompas.com, juga secara konsisten menampilkan narasi yang netral dan informatif, berfokus pada aspek regulasi dan pelestarian. Kompas.com, misalnya, menegaskan, “Penggunaan *drone* harus mendapatkan izin resmi demi menjaga kelestarian kawasan konservasi.” Kalimat ini secara langsung memosisikan kebijakan sebagai upaya konservasi lingkungan yang tidak dapat ditawar. Senada dengan itu, JawaPos.com menekankan aspek hukum dengan kalimat yang lugas, “Aturan terkait larangan *drone* mengacu pada regulasi kawasan konservasi alam,” yang menggarisbawahi dasar hukum yang kuat di balik kebijakan tersebut. Liputan6.com, dengan gaya yang serupa, menulis, “Penerbangan *drone* tanpa izin bisa mengganggu aktivitas wisata dan satwa liar di kawasan taman nasional.” Kesamaan dalam penggunaan bahasa formal, penekanan pada otoritas, dan fokus pada regulasi ini secara jelas memperlihatkan bahwa media arus utama secara kolektif berupaya membingkai isu ini dalam kerangka legalitas dan kepentingan umum, sehingga kebijakan tersebut tampak sebagai sesuatu yang wajar dan perlu.

Di sisi lain, sebagian media memadukan gaya informatif dengan unsur dramatik sekaligus eufemistik untuk menarik perhatian pembaca yang lebih luas. Merdeka.com,

misalnya, menyoroti risiko keamanan dengan narasi yang sedikit lebih dramatis, “*Drone* yang terbang tanpa izin berpotensi membahayakan pendaki dan wisatawan,” yang menambahkan nuansa peringatan. Suara.com, dengan pendekatan yang lebih unik, menambahkan nuansa kultural dengan narasi, “*Drone* bisa merusak suasana spiritual kawasan gunung,” yang mencoba menyentuh aspek emosional dan nilai-nilai lokal. DetikJatim, dalam pemberitaannya, menggunakan istilah “penertiban *drone*,” sebuah eufemisme yang secara cerdas melembutkan tindakan represif aparat dan menggantinya dengan kesan administratif yang lebih teratur dan tidak konfrontatif. Pilihan diksi yang bervariasi ini secara jelas memperlihatkan perbedaan posisi ideologis dan strategi redaksional, apakah kebijakan dipahami sebagai pengamanan yang tegas, pembatasan yang wajar, atau penertiban yang terorganisir.

Media berbasis klik, yang mengutamakan daya tarik dan viralitas, menunjukkan gaya yang lebih hiperbolis, emosional, dan seringkali menggunakan eufemisme untuk menutupi kesan larangan keras yang mungkin kurang menarik bagi pembaca. Klikmedianetwork.com, misalnya, secara eksplisit menonjolkan sensasionalisme dengan judul, “Viral! Netizen Curiga Tarif *Drone* Mahal untuk Tutupi Ladang Ganja di Bromo.” Judul ini tidak hanya menarik perhatian tetapi juga memprovokasi spekulasi. Ntvnews.id juga menggunakan pendekatan serupa dengan judul, “Viral Ada 59 Titik Ladang Ganja di Kawasan Gunung Bromo, Pantas Dilarang Terbangin *Drone*,” yang secara langsung mengaitkan larangan dengan penemuan ganja untuk menciptakan narasi yang lebih dramatis. RadarSolo.com, dengan judul, “Heboh Tarif *Drone* di Gunung Bromo Makin Mahal Jadi Sorotan, Pasca Kasus Ladang Ganja Terbongkar! Netizen: Jadi Ini Alasannya,” memilih istilah “pembatasan penggunaan *drone*” yang terasa lebih halus dibandingkan “larangan total.” Perbedaan pilihan kosakata ini secara jelas memperlihatkan bagaimana media berbasis klik berupaya menyeimbangkan antara menarik emosi pembaca melalui sensasionalisme dan melembutkan narasi agar tetap dapat diterima dan tidak terlalu konfrontatif, sehingga memaksimalkan potensi viralitas dan interaksi.

Strategi dan Variasi Gaya Pemberitaan antara Media

Strategi dan variasi gaya pemberitaan antar media, yang memperlihatkan perbedaan antara media arus utama, media semi-klik, dan media sensasional. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada pilihan kata, tetapi juga pada bagaimana narasi dibangun dan bagaimana isu tersebut dibingkai untuk audiens yang berbeda. Secara umum, kesamaan fundamental antar

media tampak pada penekanan legitimasi larangan *drone* melalui bingkai hukum, keamanan wisatawan, dan pelestarian lingkungan. Ini adalah narasi dominan yang secara konsisten direproduksi oleh hampir semua media. Hal ini sejalan dengan temuan Fairclough (1995) yang menyatakan bahwa media sering kali mereproduksi wacana dominan yang berasal dari negara atau otoritas resmi. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai saluran untuk melegitimasi kebijakan pemerintah, menjadikan larangan *drone* sebagai sesuatu yang wajar dan perlu demi kepentingan bersama. Narasi ini jarang sekali dipertanyakan atau diberikan perspektif tandingan yang signifikan.

Namun, perbedaan mencolok muncul dalam gaya penyajian, yang mencerminkan orientasi redaksional dan target audiens masing-masing media. Media arus utama, seperti Kompas.com dan CNN Indonesia, secara konsisten menekankan objektivitas dan formalitas. Mereka cenderung menyajikan fakta secara lugas, mengutip sumber resmi, dan menghindari bahasa yang emosional atau spekulatif. Gaya ini bertujuan untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang dianggap netral dan akurat.

Sebaliknya, media semi-klik, seperti Merdeka.com dan Suara.com, memadukan gaya informatif dengan unsur dramatik dan eufemisme. Mereka mungkin menyajikan fakta, tetapi dengan sentuhan naratif yang lebih menarik, menggunakan judul yang sedikit lebih provokatif, atau menambahkan detail yang memicu emosi. Penggunaan eufemisme dalam konteks ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara menarik perhatian dan tetap terlihat "bertanggung jawab" atau "tidak terlalu keras" dalam pemberitaan.

Sementara itu, media berbasis klik, seperti Klikmedianetwork.com, Ntvnews.id, dan RadarSolo.com, secara eksplisit menonjolkan sensasi dan judul hiperbolis. Mereka tidak ragu menggunakan kata-kata seperti "Viral!", "Heboh!", atau mengaitkan isu dengan teori konspirasi "Netizen Curiga Tarif *Drone* Mahal untuk Tutupi Ladang Ganja". Tujuan utama mereka adalah menarik perhatian maksimal dan menghasilkan klik, seringkali dengan mengorbankan kedalaman atau nuansa informasi. Fakta bahwa istilah seperti "penertiban," "pembatasan," atau "pengamanan" dipilih secara berbeda antar media, bahkan dalam konteks yang sama, secara jelas memperlihatkan bagaimana bahasa menjadi sarana ideologis yang kuat dalam membentuk persepsi publik. Setiap pilihan kata membawa muatan makna yang berbeda dan dapat mengarahkan pembaca pada interpretasi tertentu.

Temuan ini secara fundamental menunjukkan bahwa teks berita bukanlah cermin realitas yang pasif, melainkan konstruksi wacana yang aktif dan sarat ideologi. Media tidak

hanya melaporkan apa yang terjadi, tetapi juga membentuk bagaimana peristiwa itu dipahami. Secara akademik, penelitian ini secara signifikan memperluas penerapan analisis wacana kritis pada isu lingkungan dan pariwisata, sebuah area yang sebelumnya jarang dikaji secara mendalam di Indonesia. Ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang bagaimana isu-isu keberlanjutan dibingkai dalam wacana publik. Secara sosial, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya literasi media kritis agar masyarakat mampu mengenali strategi kebahasaan media dan tidak mudah terjebak dalam framing ideologis. Judul sensasional seperti “*Drone* Dipakai Mengintai Ladang Ganja” atau eufemisme seperti “penertiban” dan “pembatasan” adalah contoh nyata bagaimana bahkan kata-kata sederhana pun membawa muatan ideologis yang kuat dan mampu membentuk opini publik secara halus namun efektif.

Implikasi dari Persamaan dan Perbedaan antar Media

Implikasi dari perbedaan dan persamaan representasi kebahasaan ini sangat signifikan, baik dari sisi ideologis maupun dampaknya terhadap opini publik. Secara ideologis, kesamaan dalam reproduksi narasi resmi pemerintah menunjukkan adanya konsolidasi kekuasaan melalui bahasa. Media, terlepas dari gaya penyajiannya, cenderung mengamini dan melegitimasi kebijakan negara tanpa menghadirkan wacana tandingan yang kuat. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa kebijakan larangan *drone* adalah keputusan yang mutlak benar dan tidak dapat digugat, sehingga membatasi ruang diskusi publik dan potensi kritik konstruktif. Reproduksi narasi ini juga dapat mengaburkan kompleksitas isu, misalnya dengan hanya menyoroti aspek keamanan dan lingkungan tanpa membahas potensi dampak negatif terhadap industri pariwisata berbasis drone atau hak-hak individu.

Dampak terhadap opini publik juga bervariasi. Media arus utama, dengan gaya netral dan informatifnya, cenderung membangun kepercayaan publik terhadap otoritas dan regulasi. Mereka membentuk opini yang mendukung kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan lingkungan. Namun, di sisi lain, media berbasis klik, dengan sensasionalisme dan judul hiperbolisnya, berpotensi menciptakan polarisasi dan kecurigaan di kalangan masyarakat. Meskipun mereka berhasil menarik perhatian, narasi yang mereka bangun seringkali lebih berfokus pada drama dan spekulasi daripada analisis mendalam, yang dapat mengarah pada penyebaran disinformasi atau misinformasi. Penggunaan eufemisme oleh berbagai media, baik arus utama maupun berbasis klik, secara kolektif berkontribusi pada "pembersihan" citra tindakan represif, membuat tindakan tersebut tampak lebih lunak dan dapat diterima,

sehingga mengurangi potensi resistensi publik. Pada akhirnya, perbedaan dan persamaan representasi ini menunjukkan bahwa bahasa dalam media adalah medan pertarungan ideologis yang membentuk bagaimana masyarakat memahami dan merespons isu-isu penting.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini secara komprehensif menunjukkan bahwa sepuluh media daring Indonesia membingkai isu larangan *drone* di Bromo melalui strategi kebahasaan yang beragam, seperti diksi formal, eufemisme, dan nominalisasi. Media arus utama secara konsisten lebih menekankan legitimasi hukum dan pelestarian lingkungan, menyajikan narasi yang cenderung netral dan informatif. Sebaliknya, media semi-klik memadukan narasi dramatik dengan eufemisme untuk menarik perhatian, sementara media berbasis klik secara eksplisit menonjolkan sensasi melalui judul hiperbolis dan narasi yang provokatif. Meskipun terdapat perbedaan gaya yang mencolok, persamaan utama yang ditemukan adalah reproduksi narasi resmi pemerintah tanpa menghadirkan wacana tandingan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa media, terlepas dari orientasi redaksi dan kepentingan bisnisnya, cenderung menguatkan posisi otoritas. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi representasi kebahasaan dan strategi media dalam mengonstruksi wacana larangan *drone* telah tercapai, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk realitas sosial.

Secara teoritis, penelitian ini secara signifikan menguatkan pandangan Fairclough bahwa bahasa adalah praktik sosial yang sarat ideologi, dan secara khusus memperluas penerapan analisis wacana kritis pada isu pariwisata dan lingkungan, sebuah area yang masih jarang dieksplorasi di Indonesia. Secara praktis, temuan ini menekankan urgensi peningkatan literasi media kritis di kalangan masyarakat. Kemampuan untuk mengenali framing, eufemisme, atau sensasionalisme yang digunakan media menjadi krusial agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam konstruksi ideologis yang mungkin tidak berpihak pada kepentingan publik. Penelitian ini masih terbatas pada analisis teks berita daring, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas objek ke media sosial, televisi daring, atau pendekatan multimodal, serta melibatkan analisis penerimaan audiens untuk memahami bagaimana wacana media dipersepsikan publik secara lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Profil Internet Indonesia 2023*. Jakarta: APJII. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii>

- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). (2024). *Laporan tahunan konservasi dan wisata alam*. Malang: BB TNBTS.
- Busri, H. (2009). Representasi kebahasaan dalam teks berita surat kabar: Sebuah analisis wacana kritis. *Jurnal Diksi*, universitas Negeri Yogyakarta 16(1), 62-74. <https://doi.org/10.21831/diksi.v16i1.6164>
- Busri, H. (2015). Representasi kebahasaan dalam teks berita surat kabar: Sebuah analisis wacana kritis. *Artikel lanjutan. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, FKIP Universitas Islam Malang.
- CNN Indonesia. (2025, 19 Maret). Klarifikasi Larangan Drone-Temuan Ganja di Bromo dan Semeru. *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/>
- Detik Jatim. (2024, 3 November). Federasi Drone Sayangkan Tarif Penerbangan di Bromo Dipatok Rp 2 Juta. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. (2012). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. London: Routledge.
- JawaPos.com. (2024, 22 Januari). Wisatawan nekat terbangkan Drone di Bromo, ini sanksinya. *JawaPos.com*. <https://www.jawapos.com/>
- Klikmedianetwork.com. (2025, 18 Maret). Viral! Netizen Curiga Tarif Drone Mahal untuk Tutupi Ladang ganja di Bromo. *Klikmedianetwork.com*. <https://www.klikmedianetwork.com/>
- Kompas.com. (2025, 18 Maret). Heboh Ladang Ganja di Bromo, Penemuan Berkat Drone, Ini Faktanya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/>
- Liputan6.com. (2025, 20 Maret). Aturan dan Biaya Terbangkan Drone di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 2025. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/>
- Mardhiah, N. Y. (2022). Penggunaan eufemisme pada kolom berita utama Padang Ekspres. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. UIN Suska Repository. <https://repository.uin-suska.ac.id/64518/>

Matilda, E., Silaen, G., Pratiwi, W. D., & Setiawan, H. (2023). Analisis struktur teks dan kaidah kebahasaan pada berita tragedi Kanjuruhan dalam media *Liputan6.com* edisi Oktober 2022. *INNOVATIVE: Journal of Language and Education*, 3(2), 123-135.

Merdeka.com. (2025, 19 Maret). Kenapa Penggunaan Drone Dibatasi? Ini Aturannya. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/>

Ntvnews.id. (2025, 18 Maret). Viral Ada 59 Titik Ladang Ganja di Kawasan Gunung Bromo, Pantas Dilarang Terbangin Drone. *Ntvnews.id*. <https://www.ntvnews.id/>

RadarSolo.com. (2025, 18 Maret). Heboh Tarif Drone di Gunung Bromo Makin Mahal Jadi Sorotan, Pasca Kasus Ladang Ganja Terbongkar! Netizen: Jadi Ini Alasannya. *RadarSolo.com*. <https://www.radarsolo.com/>

Richardson, J. E. (2007). *Analysing newspapers: An approach from critical discourse analysis*. London: Palgrave Macmillan.

Suara.com. (2025, 19 Maret). Viral 59 Titik Ladang Ganja di Gunung Bromo Netizen Kaitkan dengan Larangan Penerbangan Drone. *Suara.com*. <https://www.suara.com/>